

WAJAH ISLAM PESANTREN BERBASIS IDEOLOGI NEGARA: STUDI INTELEGENSIA MUSLIM PERSPEKTIF FIKIH KEBANGSAAN DI PONDOK PESANTREN LIRBOYO KOTA KEDIRI

Ammar Kukuh Wicaksono

Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri, Indonesia

Corresponden E-mail: ammar@uit-lirboyo.ac.id

ABSTRAK

Fenomena intelegensia muslim komunitas pesantren menjadi fokus penelitian ini. Pemilihan tema ini sebagai hasil refleksi mendalam tentang pembentukan karakter intelegensia muslim pesantren dan implementasi program pembentukannya di Ma'had Aly Pondok Pesantren Lirboyo melalui fikih kebangsaan. Hal ini merupakan pembeda dengan penelitian-penelitian setema terdahulu. Penelitian ini, mendalami intelegensia muslim di pesantren untuk melihat varian baru wajah muslim di Indonesia. Penelitian ini menjadikan buku fikih kebangsaan tiga jilid. Hasil pembacaan kemudian dikuatkan dengan wawancara dengan penyusun buku fikih kebangsaan, dosen Ma'had Aly dan Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri. Data-data yang dihasilkan terus menerus didialogkan dan divalidasi menggunakan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajah intelegensia muslim di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, dibentuk melalui pembelajaran akademik dan non akademik di Ma'had Aly Lirboyo Kota Kediri. Pembentukan identitas melalui penanaman berbasis pembelajaran menggunakan paradigma fikih kebangsaan. Dengan begitu, wajah intelegensia muslim pesantren di Pondok Pesantren Lirboyo merupakan hasil integrasi nilai-nilai keislaman berbasis kitab klasik dengan ideologi AhlulSunnah Waljamaah An Nahdliyah dan Nasionalisme

Kata Kunci: Wajah Islam; Ideologi Negara; Intelegensia Muslim; Fikih

ABSTRACT

The phenomenon of Muslim intellectuals in Islamic boarding schools is the focus of this study. The selection of this theme is the result of deep reflection on the formation of the character of Muslim intellectuals in Islamic boarding schools and the implementation of programs to shape them at Ma'had Aly Pondok Pesantren Lirboyo through national fiqh. This distinguishes it from previous studies on the same theme. This study delves into Muslim intellectuals in pesantren to identify new variations of the Muslim identity in Indonesia. The research is based on a three-volume book on national fiqh. The findings were further strengthened through interviews with the author of the book on national fiqh, lecturers at Ma'had Aly, and the head of Pondok Pesantren Lirboyo in Kediri City. The data collected were continuously discussed and validated through observation. The research findings indicate that the face of Muslim intellectuals at the Lirboyo Islamic Boarding School in Kediri City is shaped through academic and non-academic learning at the Ma'had Aly Lirboyo in Kediri City. The formation of identity is achieved through education based on the national fiqh paradigm. Thus, the intellectual profile of Muslim boarding school students at the Lirboyo Islamic Boarding School is the result of the integration of Islamic values rooted in classical texts with the ideology of Ahlus Sunnah Wal Jamaah An Nahdliyah and nationalism.

Keyword: Student character, pesantren, character building strategy

A. PENDAHULUAN

Pasca menguatnya gerakan keislaman dengan menyoal kembali ideologi negara, pondok pesantren dituntut hadir menjadi benteng pertahanan ideologi. Gerakan pondok pesantren dituntut menjadi lembaga mentranfer nilai-nilai keagamaan (Fatihin, 2017). Pada saat bersamaan, pondok pesantren harus menanamkan nilai-nilai keagamaan yang mendukung ideologi negara. Hal ini dapat

dilihat adanya berbagai program penguatan Pancasila di lingkungan pesantren dan kewajiban memilih identitas keilmuan Makhad Aly. Meskipun, tidak bisa dipungkiri dalam sejarahnya pondok pesantren menjadi komponen penting dalam mendukung kemerdekaan.

Dalam perspektif transformasi sosial, pondok pesantren dianggap wadah membangun kelas menengah baru. Yudi Latif menegaskan bahwa awal keberadaan kelas menengah kedua (*inteligensia muslim*) terbentuk karena keilmuan keislaman. Persinggungan kesadaran keilmuan keislaman dengan cengkraman kolonialisme menjadikan karakter keilmuan dikerangkai semangat pembebasan atas ketertindasan penjajah (Daniswara & Risiko Faristiana, 2023). Komunitas pesantren yang terbentuk merupakan komunitas dari kelas abangan maupun kelas priyayi. Kelas baru yang terbentuk merupakan transformasi kesadaran untuk melawan hegemoni *status quo*.

Wasito Raharjo Jati menegaskan bahwa daya dorong *inteligensia muslim* karena doktrin agama (*geist*) (Wasisto, 2014), yang memungkinkan kesadaran pemeluk untuk melakukan transformasi kesadaran dari normatif menuju perjuangan kelas. Kajian ini selaras dengan semangat Ali Syariati yang mengaskan tentang teologi pembebasan, dimana doktrin agama digunakan untuk mendorong perjuangan kelas. Hal ini menjadi kritik epistemologis dari pemikiran Karl Marx yang menjadikan agama sebagai candu (*pereda rasa sakit*) (Hasbiyallah et al., 2019). Dalam konteks ini, dapat dipahami ajaran agama menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter *inteligensia muslim* atau kelas menengah muslim.

Kajian di atas, menunjukkan bahwa sejak awal pondok pesantren didesain untuk mencetak kelas agamawan muslim dalam perspektif transformasi kesadaran pembebasan. Islam tidak dimaknai dalam konteks keagamaan *an sich*, akan tetapi mampu berdialog dengan kebudayaan local. Keberadaan Islam memberikan kedamaian dan ketentraman diantara semua golongan. Hal ini membuktikan bahwa ideologi keislaman yang dibangun senada atau selaras dengan ideologi Negara yang menghargai perbedaan seperti Pancasila.

Berdasarkan kajian di atas, penting meneliti terbentuknya *inteligensia muslim* berperspektif fikih kebangsaan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Usaha Pondok Pesantren Lirboyo untuk meningkatkan karakter *inteligensia muslim* berspektif nasionalisme dengan mendirikan Makhad Aly Marhalah Tsani Tahassus Fikih Kebangsaan (Himasal, 2018). Sejak berdiri, tahun 2019 hingga sekarang desain pembelajaran dibangun untuk menguatkan pemahaman isu-isu nasionalisme perspektif *turost* atau kajian kitab kuning. Kesadaran yang dibangun adalah menjadikan kitab-kitab *turost* menguatkan ideologi pesantren sebagai identitas keilmuan mahasantri. Pertanggungjawaban keilmuan hasil studi harus publis di jurnal-jurnal bereputasi (wawancara, 2023).

Makhad Aly Lirboyo mempunyai distingsi penting dibandingkan dengan Makhad Aly di Indonesia. Dari 59 Makhad Aly, hanya Makhad Aly Pondok Pesantren Lirboyo yang menegaskan konsentrasi pada penguatan ideologi Negara melalui Fikih Kebangsaan. Sedangkan sebagian besar Makhad Aly berfokus pada tafsir, tasawuf dan fikih dan hadist. Di sisi lain, Makhad Aly Lirboyo telah menyusun modul pembelajaran dengan menempatkan kajian fikih kebangsaan sebagai prioritas. Setiap semester setidaknya ada 12 kali pertemuan yang khusus membahas fikih kebangsaan dalam perspektif *turost* dan isu-isu kenegaraan. Durasi waktu pembelajaran ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mata kuliah lain misalnya ushul fiqh atau hadist. Kegiatan pembelajaran ini sebagai sarana untuk membentuk karakter *inteligensia muslim*.

Sejatinya, penelitian tentang *inteligensia muslim* tidak menjadi konsentrasi para peneliti atau akademisi. Setidaknya, selama 20 tahun terakhir, kajian Yudi Latif tentang *inteligensia muslim* di Indonesia tidak banyak diikuti oleh generasi setelahnya (Latif, 2013). Kajian-kajian serupa, menegaskan varian-varian *inteligensia muslim* di Indonesia untuk membedakan dengan cedekiawan

muslim. Kajian-kajian yang dilakukan berupaya melihat kelahiran intelegensia muslim dalam konteks respon terhadap ketertindasan atau permasalahan social. Artinya kelahiran intelegensia muslim respon sosial dalam bingkai pertarungan kelas. Penelitian tidak melihat variable lain dalam membangun kesadaran intelegensia muslim misalnya budaya pesantren.

Penelitian terbaru dilakukan oleh Savran Billahi dan Idris Thaha. Fokus penelitian keduanya adalah bangkitnya kelas menengah santri; moderanisasi pesantren di Indonesia. Penelitian ini mengfokuskan diri pada jati diri kelas menengah pesantren dengan sistem pendidikan modern. Dengan pendekatan geneologi, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa bangkitnya kelas menengah santri sangat dipengaruhi sistem pendidikan modern dengan syarat pondok pesantren dekat dengan *status quo* (Billahi, 2018). Relas pesantren dengan pemerintah menjadi jalan melakukan transformasi kelas berdasarkan identitas keagamaan. Dalam konteks ini, hasil penelitian menegaskan konsep intelektual muslim.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologis. Penelitian dilakukan selama 6 bulan di Ma'had Aly Lirboyo Kota Kediri. Lokasi penelitian ini mempunyai keunikan dibandingkan dengan pondok pesantren yang lain. Pondok Pesantren Lirboyo menegaskan pembelajaran berbasis kitab klasik atau turots berideologi *Ahlulsunnah Wal Jamaah An Nahdliyah* dan nasionalisme yang terbakukan dalam fikih kebangsaan. Penelitian ini menjadikan buku fikih kebangsaan tiga jilid menjadi pintu pembuka data-data penelitian (Jhon W. Creswell, 2002). Sebagai tindak lanjut penggalan data dan konfirmasi dan validasi, peneliti meneliti sejumlah informan kunci (key informan) (Asty, 2015). Adapun informan kunci diklasifikasi menjadi dua, yaitu dosen dan perumus buku fikih kebangsaan. Di fase terakhir, observasi menjadi pelengkap keabsahan data dengan melakukan pengamatan pada kegiatan rapat evaluasi dosen/persiapan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Semua data dikumpulkan dianalisis secara sistematis menggunakan paradigma definisi, kriteria dan ruang lingkup eksistensi intelegensia muslim. Pada saat bersamaan, temuan indentifikasi intelegensia muslim dilakukan validasi dengan melakukan wawancara mendalam terhadap pengembangan eksistensinya. Semua kegiatan penelitian, diakhiri dengan membuat laporan penelitian yang dikonfirmasi dengan informan kunci (proses member cek) dan sebagai proses validasi.

C. PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wajah Intelegensia Muslim Pesantren

Bangunan pembentukan identitas intelegensia muslim berwajah fikih kebangsaan di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri dapat dipahami dalam dua elemen, yaitu pemahaman mendasar keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo tentang keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam persepektif agama Islam dan tantangannya. Sedangkan elemen lainnya adalah panggilan pemerintah terhadap Pondok Pesantren Lirboyo memfasilitasi pengakuan administrasi lulusan (ijazah) santri yang menyelesaikan seluruh tingkatan pembelajaran. Hal ini sebagai sarana santri untuk bisa diterima di semua lapisan masyarakat.

Sejatinya, keberadaan Ma'had Aly Lirboyo tidak bisa dilepaskan perkembangan kesadaran segenap keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri. Kesadaran kolektif penegasan orientasi pendidikan sebagai penguatan nasionalisme merupakan penegasan sumbangsih dan dukungan Pondok Pesantren Lirboyo terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada saat bersamaan, Fikih Kebangsaan dijadikan sebagai identitas Pondok Pesantren untuk melawan kelompok-kelompok yang berideologi ekstrimisme di tengah-tengah masyarakat (Himasal, 2018).

Sejatinya, keberadaan Fikih Kebangsaan merupakan pelembagaan pemahaman-pemahaman nasionalisme di Pondok Pesantren Lirboyo. Pemahaman ini sudah muncul sejak berdirinya Pondok

Pesantren Lirboyo. Menurut Fathul Qodir menegaskan, bahwa Fikih Kebangsaan ini sebagai identitas yang selama ini hidup di kalangan Pondok Pesantren Lirboyo (Wawancara F. Qodir, 2023). Dalam setiap pembelajaran, nilai-nilai keislaman dan kepesantrenan tidak ada yang berseberangan terhadap nilai-nilai nasionalisme.

Menurut KH. Ibrahim Hafidz *'bahwa nasionalisme di Lirboyo uwes mari (sudah terbantuk) sejak dahulu. Hal ini bisa dibuktikan dengan keberanian generasi awal mendirikan pondok pesantren yang memfasilitasi pendidikan bagi rakyat jelata. Kita tahu sareng-sareng to (bersama-sama) bahwa penjajah (Belanda) sangat melarang adanya pendidikan bagi pribumi kelas bawah. Apalagi pembelajaran agama yang tidak seama dengan agama penjajah. Karena memang dari dahulu tokoh-tokoh besar yang berani melawan penjajah sebagian besar dari tokoh-tokoh besar agama Islam.'* (Wawancara, Hafidz, 2024).

Menurut KH HM. Adibusholeh, *'salah satu alasan penjajah menolak pembelajaran atau pendidikan agama bagi masyarakat, karena adanya nilai-nilai agama yang mengajarkan untuk bersatu dan menghindari perpecahan untuk melawan kedholiman. Bersatu untuk kemaslahata bersama.* (Wawancara, H.M. Adib, 2024)' Pemahaman-pemahaman ini menjadi pondasi dasar menentukan identitas Ma'had Aly Lirboyo Kota Kediri.

Pondasi dasar identitas nasionalisme adanya pemahaman bersama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai *Mua'ahada Wathaniyah* (Himasal, 2018). Dasar pemikiran ini menjadi penegasan tentang pentingnya Pancasila. *Mua'ahada Wathaniyah* dipahami sebagai konsesus bangsa. Pandangan ini ditegaskan dalam buku Fikih Kebangsaan dan menjadi payung nilai-nilai dalam penyelenggaraan Ma'had Aly Lirboyo. Menurut KH Aminullah, *"salah satu dasar yang digunakan oleh kami adalah pemahaman Mua'ahada Wathaniya. Dasar ini sebagai payang dalam pembelajaran Ma'had Aly Lirboyo"*. (Wawancara, Amin, 2024)

Dalam suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas diceritakan ketika kaum Aus dan Khazraj duduk-duduk, berceritalah mereka tentang permusuhannya di zaman jahiliyyah, sehinggabangkitlah amarah kedua kaum tersebut. Masing-masing bangkit memegang senjatanya, saling berhadapan. Maka turunlah ayat 103 yang melerai mereka. Sedangkan menurut Tafsir al-Misbah dalam Endang Pristiwati, yang berpendapat "kepada tali Allah" berarti kepada janji Allah. Ada yang berpendapat kepada tali Allah itu maksudnya Al Quran. Allah memerintahkan mereka untuk bersatu dalam jama'ah dan melarang untuk berpecah belah (Himasal, 2018).

Sedangkan Nilai-nilai *Mua'ahada Wathaniyah* juga konstruksi nilai-nilai dalam bingkai nasionalisme. Secara umum nilai yang dikembangkan adalah cinta tanah air dan rela berkorban terhadap NKRI. Menurut KH Ibrahim Hafidz, *"Sekarang ini perlu sekali untuk melakukan penguatan cinta tanah air seperti yang diajarkan oleh para masyayikh. Yang paling penting itu memahami embali bahwa baguan dari pengormaban kepada agama adalah rela berkorban untuk menjaga Indonesia.* (Wawancara, Hafidz, 2024)..

Di sisi lain, fenomena yang menyita perhatian para pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo adalah semakin banyaknya alumni yang tergabung dengan Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia. Hal ini terketahui dalam Group WA atau Face Book yang menunjukkan afiliansinya tersebut. Ironisnya, ada sebagian yang menolak untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang sah. Menurut H. Aminullah, *"kita tidak bisa memungkiri, bahwa sebagian tapi memang tidak sangat banyak yang tergabung dengan FPI atau HTI. Kita juga menemukan dalam perdebatan para alumni di group-group sosial media yang menolak mengakui Indonesia sebagai Negara."* (Wawancara, Amin, 2024)

Keresahan atau kekhawatiran para pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo tidak sampai di situ. Pemahaman yang salah tentang Negara Indonesia ini sangat mungkin ditularkan kepada santri-santri di Pondok Pesantren Lirboyo. Pasalnya jaringan alumni setiap saat sangat terbuka berinteraksi dengan santri-santri Lirboyo. Menurut KH. Ibrahim Hafidz, *"kajadian yang sangat meresahkan kita yang ada di yayasan dan para masyayikh itu, nek iki dijärke wae, besar kemungkinan akan mempengaruhi santri-santri di pondok pesantren niki. Karena mereka itu ya, masih mungkin berhubungan dengan adik-adik kelasnya. Jika itu terjadi, maka*

wajah Pondok Pesantren Lirboyo lama-kelamaan akan menjadi musuh masyarakat dan negara". (Wawancara, Hafidz, 2024).

Saat itu, Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal), bahwasanya fenomena seperti itu juga dialami oleh sebagian alumni sendiri, khususnya yang berasal dari Jawa Barat. Dari sebagian alumni tersebut, mereka tidak memahami *manhaj* politik para masyayyih. Akibatnya, ketika mereka sudah berada di bawah akar rumput masyarakat sangat mudah terpengaruh dengan ideologi atau *manhaj* politik yang berbeda dengan para masyayyih. Ironisnya, perbedaan atas dasar ketidakpahaman tersebut diekspresikan dengan bentuk caci-maki terhadap para masyayikh, khususnya dari kalangan tokoh-tokoh NU. Kesadaran seperti inilah yang menggerakkan Himasal untuk mengkaji isu-isu kebangsaan dengan perspektif fikih dengan mengadakan *bahtsul masa'il*.

Selain atas dasar kesadaran terhadap fenomena yang terjadi, alasan lain yang menopang lahirnya gagasan fikih kebangsaan ini adalah karena program pendidikan yang ada di Ma'had Aly pesantren Lirboyo adalah Fikih dan Ushul Fikih dengan takhassus (konsentrasi) Kebangsaan. Sehingga merupakan suatu kewajiban tersendiri bagi Pesantren Lirboyo untuk mengupas isu-isu kebangsaan dengan perspektif fikih. Awalnya, hasil dari *bahtsul masa'il* ini dibukukan sebagai pegangan para alumni ketika sudah berada di masyarakat. Akan tetapi, karena permintaan masyarakat umum, buku ini dicetak sampai beberapa kali untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum. Hingga saat ini, kajian *bahtsul masa'il* dengan tema kebangsaan sudah dilakukan yang ketiga kalinya, dan sudah dibukukan semua. Dengan begitu pengukuhan identitas nasionalisme menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh Pondok Pesantren Lirboyo.

Pengukuhan dengan nilai-nilai ini sejalan dengan dasar falsafah pendirian Ma'had Aly yang dicetuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ma'had 'Aly adalah bagian dari komponen pendidikan yang ada di Indonesia yang berdasarkan Islam dan Pancasila. Dengan Islam dimaksudkan bahwa Ma'had 'Aly diadakan, diselenggarakan dan dikembangkan berangkat dari ajaran Islam, dilaksanakan proses pengelolaannya secara Islami dan menuju apa yang diadialkan oleh model-model pendidikan yang Islami, dan dengan Pancasila dimaksudkan bahwa Ma'had 'Aly diselenggarakan, dikembangkan dan diamalkan dalam wacana Pancasila sebagai landasan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Fikih kebangsaan merupakan suatu kajian tentang hukum fikih yang mengkaji tentang kebangsaan. Atau dengan kata lain, suatu jawaban atas fenomena tentang kebangsaan yang sering terjadi dengan menggunakan perspektif fikih, dengan perpaduan antara teks syariat dan konteks (*'urf* dan kemaslahatan) yang ada di wilayah tersebut. 'Urf yang berarti kebiasaan atau adat yang sudah disepakati, dalam konteks kenegaraan ini adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, dan NKRI. Selain menggunakan teks syariat, keempat pilar sebagai kesepakatan ini juga digunakan sebagai alat analisis untuk menjawab berbagai persoalan kebangsaan yang terjadi pada bangsa Indonesia. Dengan orientasi dan pertimbangan kemaslahatan. Contoh halnya seperti mengapa hukum mencuri di Indonesia tidak diterapkan potong tangan, dan lain sebagainya.

Adapun pengamalannya bisa mewujudkan tegaknya syariat Islam. Selain itu, KH. Ahmad Siddiq juga memaparkan argumentasi teologis dan fiqih, di antaranya: 1] Mendirikan negara dan membentuk kepemimpinan dalam negara sebagai upaya memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan dunia hukumnya wajib. 2] Kesepakatan bangsa Indonesia mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia hukumnya sah dan mengikat semua golongan termasuk umat Islam. 3] mendirikan Negara Kesatuan Indonesia hukumnya sah dan harus diperhatikan. Sehingga sah hukumnya jika keempat pilar ini dijadikan pertimbangan dalam menggali hukum fikih tentang kenegaraan atau kebangsaan. Di satu sisi menggunakan teks yang sudah dipaparkan oleh para ulama, di lain sisi juga mempertimbangkan empat pilar yang sudah menjadi kebangsaan bernegara (Farid, 2019). Dengan demikian, identitas Ma'had Aly Lirboyo Kota Kediri adalah Fikih Kebangsaan.

Implementasi Ideologi Intelegensia Muslim Pesantren

Implementasi ideologi Intelegensia muslim pesantren dilaksanakan melalui pembelajaran akademik dan non akademik. Kegiatan-kegiatan pembelajaran tersebut dilaksanakan sebagai pengejawantahan pembelajaran bersumber pada buku fikih kebangsaan. Pada saat bersamaan, buku fikih kebangsaan juga didukung dengan khasanah literasi klasik sebagai penopangnya, yaitu kitab-kitab ulama salaf (turors). Dalam buku Fikih pertama, mengambil tema Kebangsaan Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinekaan. Tema ini memayungi tentang kabsahan negara dalam perspektif ajaran Islam *ahlulsunnah Wal Jamaah an Nahdliyah*. Secara umum, segenap komunitas pesantren berpaham ahlulsunnah Wal Jamaah an Nah dliyah memahami kebangsaan sebagai bentuk pemahaman nasionalisme. Dalam konteks ini, nasionalisme atau kebangsaan dapat dimakanai dua cara, yaitu secara antropologis dan politis. Secara antropologis bangsa adalah sebuah masyarakat yang berdiri sendiri disatukan oleh kesamaan sejarah, agama, budaya, bahasa, ras-ras, dan adat istiadat. Sedangkan secara politik adalah masyarakat yang tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai kekuasaan tertinggi (Yatim, 2010).

Secara kesejarahan, pemaknaan kebangsaan atau nasionalisme adalah kesadaran kolektif yang didasarkan pada pengalaman hidup yang sama guna mewujudkan cota-cita hidup bersama (Kohn, 1984). Oleh karena itu, nasionalisme merupakan kesetiaan tertinggi yang diberikan oleh setiap individu kepada negaranya. Hal ini muncul akibat perdebatan di kalangan ilmuan muslim tentang hubungan agama dan Negara yang berakar pada pemahaman tentang umma, khalifah, dan syariah. Bagi kelompok Islam yang memiliki pandangan kesatuan agama dan politik Islam (*al-Islam din wa daulah*) bahwa ketiga konsep tersebut merupakan kesatuan yang utuh tak terpisahkan. Mereka mengungkapkan bahwa Islam tidak mengakui adanya pemisahan antara agama dan politik, Islam tidak membedakan antara domain publik dan privat, yaitu negara dan komunitas agama (*ummah*), dan otoritas politik itu (*khalifah*) dan otoritas agama (*shari'ah*) (Yatim, 2010).

Hubungan agama dan negara dibingkai simbiosis mutualisme, dimana keduanya saling memberikan manfaat. Paradigma simbiosis merupakan pandangan yang paling yang berada di tengah-tengah (moderat). Paradigma ini berpandangan bahwa agama dan negara itu berhubungan dalam ketersalingan, yaitu saling butuh membutuhkan. Negara butuh agama, dan agama butuh agama. Keduanya berhubungan agar dapat berkembang secara bersama-sama (Muin & Masruhan, 2022)

Musda Mulia dengan mengutip pendapatnya Haikal, mengemukakan, bahwa dalam secara tekstual (Al Qur'an dan Hadis) tidak ditemukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas dan rinci menjelaskan mengenai persoalan tersebut. Justru yang muncul dalam kedua teks tersebut adalah seperangkat nilai-nilai etika-moral yang bisa menjadi pedoman bagi perbuatan dan pergaulan manusia dengan lainnya. Jadi tidak secara khusus menjelaskan tentang pembentukan negara. Masalah ini sepenuhnya masalah ijtihadiyyah. Yang penting dalam bernegara berpegang pada prinsip dasar Islam dalam hidup bermasyarakat, yaitu kebebasan (*freedom*), persamaan (*equality*), dan persaudaran (*brotherhood*) (Syamsudin, 1999).

Sejatinya, di Indonesia hubungan agama dan negara dapat dibaca 3 tipologi. Pertama, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara integral. Domain agama juga menjadi domain negara, demikian sebaliknya, sehingga hubungan antara agama dan negara tidak ada jarak dan berjalan menjadi satu kesatuan. Tokoh pendukung gerakan ini adalah al-Maududi. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara simbiotik dan dinamis-dialektis, bukan berhubungan langsung, sehingga kedua wilayah masih ada jarak dan kontrol masing-masing, sehingga agama dan negara berjalan berdampingan. Keduanya bertemu untuk kepentingan pemenuhan kepentingan masing-masing, agama memerlukan lembaga negara untuk melakukan akselerasi pengembangannya, demikian juga lembaga negara memerlukan agama untuk membangun negara yang adil dan sesuai dengan spirit ketuhanan (Syamsudin, 1999).

Dalam sejarah bangsa Indonesia, hubungan antara agama (Islam) dan negara berkembang menjadi empat golongan. Pertama, golongan yang mengintegrasikan antara agama dan negara sebagai

dua hal yang tidak terpisahkan. Sejarah integrasi agama dan negara berjalan dengan intensif pada masa pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Islam Perelak, Kerajaan Islam Samudera dan Pasai di Aceh. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut, hukum negara menjadi hukum agama dan hukum agama juga menjadi hukum negara. Relasi agama dan negara tersebut berjalan aman dan damai tanpa adanya konflik. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara berjalan dalam pusaran konflik dan saling menafikan di antara keduanya sebagaimana terjadi di Sumatera Barat. Konflik kaum agamawan memiliki kehendak untuk menerapkan norma-norma agama/Islam secara totalitas, sedangkan warga masyarakat lokal menolak pemberlakuan norma agama tersebut. Kejadian tersebut menimbulkan perang terbuka yang dikenal dengan perang Paderi (perang para pemuka agama). Dari kejadian itu kemudian muncul semboyan “adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi Kitābullah” yang artinya; eksistensi hukum adat diakui selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat agama Islam (Alford, n.d.). Ketiga, golongan yang membangun hubungan dinamis-dialektis antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan secara gradual dalam sistem hukum nasional dan berjalan tanpa konflik sebagaimana sistem ketatanegaraan kerajaan Goa. Keempat, golongan yang membangun hubungan sekular-ritualistik antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan dalam tradisi ritual keagamaan oleh pemerintah sebagai simbol pengayoman kepada warganya, sehingga masyarakat merasa diayomi dengan kedatangan pemimpin, sebagaimana tradisi kerajaan Jawa. Para raja Jawa menghadiri kegiatan ritual keagamaan hanya dua kali setahun di Masjid atau sekatenan. Para raja Jawa memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama tertentu, yang penting juga taat kepada raja (Sari & Dozan, 2021).

Dari segi gerakan politik, hubungan antara agama dan negara di Indonesia mengalami perkembangan dalam bentuk oposisi, alienasi dan integrasi. Tiga tipologi gerakan agama tersebut telah mengalami dinamika yang progresif dan silih berganti. Islam sebagai agama memainkan peran politik oposisi terhadap pemerintahan Majapahit, sejak awal berdirinya Kerajaan Islam Demak. Sedangkan pada masa pemerintahan kerajaan Islam Demak, Islam dan politik kenegaraan terbangun secara terintegrasi, tetapi ketika pusat kekuasaan Islam beralih kepada kerajaan Mataram, maka tipologi hubungan Islam tidak mengambil pola integrasi sebagaimana praktik kerajaan Islam Demak, tetapi kerajaan Mataram Islam mengambil model moderat yang berkarakter sinkretis. Peran raja sebagai simbol keagamaan cukup hadir dua kali selama setahun, walaupun kesehariannya tidak datang ke Masjid (Hadi, 2011).

Dalam konstruksi politik, dalam buku fikih kebangsaan hubungan agama merujuk pada pandangan dan sikap politik KH A Wahid Hasyim. Hal ini merujuk pada perannya dalam penghapusan tuju kata dalam Piagam Jakarta. Hasilnya sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-NRI) Tahun 1945 dengan ideologi Pancasila. Dalam rumusan ideologi dan konstitusi tersebut, substansi negara Indonesia adalah berbentuk negara yang religius (religious nation state). Negara tidak menafikan peran agama, dan agama juga tidak menolak eksistensi negara. Antara agama dan negara memiliki peran penting dalam menyukseskan cita-cita kemerdekaan RI, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial dan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Sahrir et al., 2021).

Sikap dan pandangan politik KH Wahid Hasyim tersebut juga memiliki kesamaan dengan sejarah penyusunan naskah Perjanjian *Hudaibiyah* dan Piagam Madinah dimana Nabi saw mengambil kebijakan substantif, bukan formalistik. Walaupun simbol-simbol formal ketuhanan dan kerasulan dihapus dalam naskah perjanjian tersebut, tetapi Nabi saw tetap menerimanya karena substansi dan tujuan agama dapat dijalankan sebagaimana mestinya, misalnya Nabi saw masih bisa menjalankan ibadah umrah di Makkah, memberikan perlindungan kepada semua warga dan memajukan kesejahteraannya (Wahid, 2006). Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi bukti bahwa NKRI merupakan negara yang secara substansial memiliki kesamaan dengan negara bentukan Nabi saw sebagai negara religius (religious nation state). Nabi saw memerangi orang-orang ateis (kafir) dan

pemerontak, tetapi Nabi SAW menjaga dan melindungi kaum non-Muslim. Demikian juga NKRI melarang adanya sikap anti Ketuhanan dan anti Keagamaan, tetapi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya” (Himasal, 2018).

Pada akhirnya, buku fikih kebangsaan memuat nilai-nilai relasi agama dan negara guna mencapai kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia yang sangat plural dan bearagam. Tujuan ini diambil dari Pembukaan UUD-NRI 1945 memiliki kesamaan tujuan, yaitu menjaga eksistensi keesaan Tuhan, menjaga harkat dan martabat manusia, menjaga persatuan dan kesatuan, kebijakan kenegaraan dibangun berdasarkan musyawarah. Empat prinsip tersebut ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat Indonesia (Rifai, 2022). Dalam bahasa ilmu ushul fiqh dikenal dengan kemaslahatan umum (al-maslahah al-‘ammah) (Khallaf, n.d.). Kemaslahatan atau kesejahteraan menjadi tujuan utama dalam norma-norma agama Islam. Bahkan kemaslahatan umum (al-maslahah al-‘ammah) harus diutamakan dalam menentukan kebijakan negara, sebab kebijakan kenegaraan harus melahirkan kemaslahatan umum bagi rakyatnya (tashārruf al-imām ala ar-rā’iyah manutun bi al-maslahah) (Khallaf, n.d.).

Untuk menjaga kemaslahatan umum tersebut, Alwi Shihab menegaskan perlunya memelihara toleransi dan kerukunan beragama sebagai budaya warga masyarakat yang sudah mengakar sebagaimana juga telah dijadikan spirit Pancasila dan UUD-NRI 1945 (An-Na’im, 1990). Kepentingan kemaslahatan warga masyarakat juga telah dicontohkan oleh Imam Asy-Syafi’i, pendiri madzhab syafi’i, yang memutuskan masalah hukum agama berdasarkan kondisi budaya warga masyarakat dengan mengeluarkan fatwa qaul qadim ketika tinggal di Irak dan qaul jadid ketika tinggal di Mesir.

Salah satu usaha untuk menjaga kemaslahatan dalam konteks Indonesia adalah menguatkan sikap toleran. Dalam pandangan Islam, toleran merujuk pada konsep *tasamuh*. Toleransi beragama di sini tidak lantas dimaknai sebagai adanya kebebasan untuk menganut agama tertentu pada hari ini dan menganut agama yang lain pada keesokan harinya. Toleransi beragama juga tidak berarti bebas melakukan segala macam praktik dan ritus keagamaan yang ada tanpa peraturan yang ditaati. Toleransi dalam kehidupan beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan akan adanya agama-agama lain selain agama yang dianutnya dengan segala bentuk sistem dan tata cara peribadatnya, serta memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing, tanpa harus bertabrakan dalam kehidupan sosial karena adanya perbedaan keyakinan tersebut.

D. KESIMPULAN

Penelitian bertema intelegensia muslim di pesantren merupakan fenomena nyata, akan tetapi tidak tersentuh sebagai fokus penelitian. Fenomena pondok pesantren menjadi magnet menarik untuk diteliti, khususnya pemerhati varian-varian wajah atau identitas muslim di Indonesia. Berdasarkan kajian berfokus pada fenomena intelegensia muslim di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, dapat diambil kesimpulan bahwa, wajah intelegensia muslim di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, dibentuk melalui pembelajaran akademik dan non akademik di Ma’had Aly Lirboyo Kota Kediri. Pembentukan identitas melalui penanaman berbasis pembelajaran menggunakan paradigma fikih kebangsaan. Dengan begitu, wajah intelegensia muslim pesantren di Pondok Pesantren Lirboyo merupakan hasil integrasi nilai-nilai keislaman berbasis kitab klasik dengan ideologi Ahlulsunnah Waljamaah An Nahdliyah dan Nasionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Alford, R. R. (n.d.). *Agama dan Politik” dalam Roland Robertson (ed.), Agama: dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis, terj. Achmad Fedyani Saifuddin.* Rajawali.
- An-Na’im, A. A. (1990). *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and*

- International Law. In Syracuse, N.Y: Syracuse University Press.
- Asty, W. (2015). Strategi diferensiasi untuk menciptakan keunggulan bersaing di Savali Hotel Padang. *Soshum Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 153–162.
- Daniswara, R. A., & Risiko Faristiana, A. (2023). Tranformasi Peran Dan Dinamika Keluarga Di Era Digital Menjaga Keluarga Dalam Revolusi Industri 4.0 Tantangan Dalam Perubahan Sosial. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(2), 29–43. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i1>.
- Farih, A. (2019). Konsistensi Nahdlatul Ulama' dalam Mempertahankan Pancasila dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah Wacana Negara Islam. *Jurnal Politik Walisongo*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jpw.v1i1.2026>
- Fatihin, R. (2017). Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila. *Panangkarana: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(2), 293. <https://doi.org/10.14421/panangkarana.2017.0102-06>
- Hadi, S. (2011). Relasi dan Reposisi Agama dan Negara: Tatapan Masa Depan Keberagamaan di Indonesia. *Jurnal Millah*, 10(2), 228–229.
- Hasbiyallah, Sulhan, M., Khoiruddin, H., & Burhanudin, U. (2019). Memotret Wajah Islam Melalui Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 17(2), 227–244. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v17i2.3216>
- Himasal, T. (2018). *Fikih Kebangsaan, Merajut Kebersamaan di Tengah kebhinikhaan*. Lirboyo: Lirboyo Press dan LTN Himasal.
- Khallaf, A. W. (n.d.). *Ilm Ushul al-Fikih*. Dar al-Qalam.
- Kohn, H. (1984). *Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya*. PT. Pembangunan.
- Latif, Y. (2013). “Membumikan Etika Pancasila Dalam Penyelenggaraan Negara” *Prosiding Kongres Pancasila V 2013 Strategi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menguatkan Semangat Ke-Indonesia*.
- Muin, A., & Masruhan, M. (2022). Konflik Tentang Pernikahan: Tinjauan Sosio Historis Ayat 3 Dan 6-9 Surah Al-Nur. *Al-Thiqah : Jurnal Ilmu Keislaman*, 5(2). <https://doi.org/10.56594/althiqah.v5i2.69>
- Rifai, M. (2022). Biaya Kampanye dalam Sistem Proporsional Terbuka. *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 18(2), 45–57.
- Sahrir, S., Syamsuddin, S., & Sultan, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 14–30. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3517>
- Sari, E. S., & Dozan, W. (2021). Konsep Pluralisme Pendidikan Islam di Indonesia Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Ta'limuna*, 10(02), 21–39.
- Syamsudin, D. (1999). *Usaha Pencarian Konsep Negara*”, dalam Abu Zahra (ed.), *Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia*. Pustaka Hidayah.
- Wahid, A. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. The Wahid Institute.
- Yatim, B. (2010). *Sejarah Peradaban Islam*. Raja Grafindo Persada.